

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi negara kurang berkembang adalah menekankan eksploitasi pertanian untuk membuat transisi berlangsung cepat kearah industriliasasi. Didalam pemerintahan orde baru salah satu kebijakan adalah mengikuti jalur pembangunan ekonomi, terutama berdasarkan pembangunan pertanian.

Didalam mengikuti jalur pembangunan berdasarkan pembangunan pertanian, pemerintah banyak melakukan inovasi, seperti menciptakan Bulog (Badan Urusan Logistik) sebuah badan yang atau lembaga pemerintah yang dirancang untuk meredam gejolak pasokan harga beras. Negara juga melaksanakan program investasi besar-besaran untuk prasarana. Dengan pasokan input pertanian mencapai desa, dan produk pertanian bisa dengan cepat masuk pasarnya. Dua contoh kebijakan-kebijakan pemerintah ini dapat menolong pencapaian tujuan : 1. pencukupan kebutuhan pangan masyarakat dan 2. pencegahan urbanisasi besar-besaran dengan menyediakan lapangan pekerjaan di desa.

Di dalam sejarah pertanian, Indonesia membentang di garis khatulistiwa sebagai negara kepulauan terbesar. Sebagaimana besar curah hujan jatuh pada musim Oktober-Maret. Musim kemarau terjadi pada bulan April-September. Lahan tanah yang subur sangat cocok dan efisien dalam lahan pertanian. Di daerah Jawa, Bali, Madura, dan Sulawesi Selatan para petani secara tradisional memetik hasil padi dua kali setahun

Dengan adanya kemajauan teknologi di bidang pertanian, jumlah panen bisa ditingkatkan menjadi lima kali dalam dua tahun.

Sejak Orde Lama, banyak program pertanian modern yang dikenalkan pemerintah dalam hal meningkatkan produktivitas pertanian. Dalam teknologi dan pendidikan pertanian, pada awal-awal Orde Baru mulai berkuasa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB), sangat membantu dalam peran pengembangan kebijakan, pemulihan bibit, dan tehknik baru untuk bercocok tanam. Program aslinya adalah Panca Usaha Tani, yaitu :1. perbaikan pengendalian air. 2. penggunaan bibit unggul. 3. penggunaan pupuk dan peptisida. 4. metode bercocok tanam yang lebih baik. 5. koperasi yang lebih kuat. (Radius Prawiro, 1998; 200)

Beberapa koperasi juga mempunyai peranan penting dalam hal pertanian sebagai tempat penyaluran kredit. Secara umum koperasi mempunyai dua peranan penting dalam hal membangun pertanian. Pertama, unit fungsional praktis yang menciptakan hubungan langsung antara Bulog dan para petani, tanpa ada hubungan ini tidak akan mungkin terjadi aktivitas jual beli beras. Kedua, koperasi menjadi alat komunikasi dan mobilisasi petani pada sakla nasional untuk daerah pertanian dan perdalaman.

Selama periode 1969-1984, pemerintah banyak mengeluarkan dana dalam hal perbaikan irigrasi dan membangun sistem irigrasi yang baru untuk lebih 2,7 juta hektar lahan pertanian, tidak dalam hal prasaran irigrasi dibangun dalam hal pertanian. Program besar-besaran dalam membangun prasaran dalam mempercepat pertanian juga dibangun seperti rehabilitasi jalan-jalan yang rusak dan perbaikan

## 2. Industri skala kecil.

Dalam definisi lama industri skala kecil mempunyai 1-9 orang pegawai tanpa menggunakan mesin atau 1-4 orang mempunyai mesin dan dalam definisi baru dalam industri skala besar mempunyai 5-9 pegawai.

## 3. Industri skala menengah.

Dalam definisi lama industri skala menengah mempunyai 10-99 orang pegawai tanpa menggunakan bantuan mesin atau 5-49 orang pegawai dengan di bantu mesin dan dalam definisi baru industri skala menengah mempunyai jumlah 20-99 orang pegawai.

## 4. Industri skala besar

Dalam definisi lama industri skala besar mempunyai jumlah 100 orang pegawai tanpa di bantu mesin dalam memproduksi atau 50 orang pegawai dengan di bantu mesin dalam memproduksi dan dalam definisi baru mempunyai jumlah 100 orang pegawai. (BPS; 2000)

Karena infrastruktur Indonesia sangat terbelakang, tidaklah praktis bagi sebagian besar industri kecil dan rumah tangga untuk menjual barang mereka di luar pasar lokal. Industri, khususnya manufaktur, hanya memberi sumbangan kecil dalam menciptakan lapangan pekerjaan pada masa Orde Baru.

Para pakar ekonomi sering kali mengevaluasi pembangunan ekonomi dengan melihat seberapa jauh sebuah negara berorientasi ke dalam (*inward looking*) atau berorientasi ke luar (*outward looking*). Biasanya, negara yang berorientasi ke dalam adalah negara yang mencoba untuk mempromosikan industrialisasi melalui

substitusi impor. Perekonomian yang berorientasi ke dalam biasanya tidak ramah terhadap investasi asing dan cenderung untuk mempertahankan rezim perdagangan yang restriktif. Sebaliknya, negara yang berorientasi ke luar berusaha untuk memperluas perdagangan luar negeri dengan tetap membuka pintu ekspor dan penanaman modal asing.

Karakteristik berorientasi ke dalam atau ke luar berhubungan erat dengan dua ide, yaitu kebijakan substitusi impor dan promosi ekspor. Kedua strategi ini merupakan dua dasar penting dalam pemikiran fundamental tentang perdagangan dalam pembangunan ekonomi.

Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama (Repelita I) merupakan salah satu manifestasi formal dalam kebijakan industrilisasi Orde Baru. Sambil menekankan kebijakan pertanian, dan rencana ini juga menegaskan posisi sentral industrialisasi dalam pembangunan Indonesia.

Repelita I pemerintah sangat ambisius dalam meningkatkan produksi paling sedikit 90% dalam lima tahun. Dalam hal mencapai tujuan itu, pemerintah berencana untuk menekankan rehabilitasi dari investasi industri yang sudah ada serta investasi baru. Negara ini memerlukan perencanaan untuk mengembangkan industri dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Industri yang mendukung pembangunan pertanian atau pengolahan produk pertanian.
2. Industri yang menghasilkan devisa atau menghemat devisa dengan cara menghasilkan komoditas substitusi impor

3. Industri yang mengelolah bahan baku domestik dalam jumlah besar.
4. Industri padat karya.
5. Industri yang meningkatkan pembangunan regional. (Radius Prawiro, 1998; 231-232)

Sejak permulaan, pemerintahan Orde Baru berharap untuk memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah mencoba mendorong pendekatan dua jalur terhadap industrialisasi: pada satu sisi, untuk pertama kalinya pemerintah memberi kesempatan dan mendorong pembangunan sektor swasta yang tangguh dan dilain pihak, pemerintah melihat dirinya sebagai arsitek utama dari pembangunan negara, dan bersedia mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Ada enam alasan pendukung sektor ekonomi negara yang kuat, adalah sebagai berikut :

1. BUMN dapat menghasilkan pemasukan yang mendukung operasi pemerintah.
2. Negara dapat memanfaatkan sumber dayanya untuk menciptakan unit ekonomi yang dapat membatu pencapaian tujuan ekonomi strategis yang tertera dalam rencana lima tahun negara.
3. Negara dapat berusaha dalam bidang yang di luar jangkuan sumber finansial dari kebanyakan pengusaha lokal.
4. Dalam perekonomian di mana partisipan penduduk pribumi Indonesia berkonsentrasi pada pertanian, negara dapat memanfaatkan sumber dayanya

untuk menciptakan kesempatan kerja dalam bisnis dan perindustrian yang sebelumnya tidak ada.

5. Dalam beberapa kesempatan, BUMN memperkenalkan pembangunan industri di daerah terpencil.
6. Dalam beberapa hal, keterkaitan negara dalam sektor swasta bertujuan untuk melenyapkan spekulasi. (Radius Prawiro, 1998;405-411)

Pada 1 Januari 1967, Indonesia mengeluarkan salah satu kebijakan penting dalam membangun perekonomian moderen, yaitu memberlakukan undang-undang yang mengatur investasi asing dan domestik. Investasi asing dijamin tidak akan dinasionalisasi tanpa kompensasi yang memadai. Nasionalisasi perusahaan asing terjadi pada Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Sebagai bukti keseriusan pemerintahan Orde Baru dalam mengundang investasi asing adalah mengembalikan perusahaan-perusahaan kepada pemiliknya yang pernah di nasionalisasi oleh pemerintahan Orde Lama dan pemerintah memberi kompensasi finansial kepada pemilik perusahaan asing yang pernah di nasionalisasi oleh pemerintahan Orde Lama.

Pada 29 Desember 1973, harian Kompas memuat tulisan yang berjudul "Ekonomi Tahun 1973: Cerah dan Suram Sela Menyela". Dalam beberapa minggu setelah tulisan itu dikemukakan, pemerintah mengadakan perubahan dalam kebijakan ekonomi sebagai berikut :

1. Semua investasi asing harus berupa usaha patungan dengan pribumi

(penduduk pribumi Indonesia) sebagai mitra usaha

2. Para investor asing diharuskan untuk mengalihkan 51% saham proyeknya kepada mitra Indonesia dalam jangka waktu sepuluh tahun.
3. Kalau mitra Indonesia bukan seorang penduduk Indonesia, 51% saham lokalnya ini harus dicapai melalui pasar bursa dengan sedikitnya 50% dari sahamnya ini di jual kepada penduduk pribumi.
4. Untuk melindungi investasi yang ada, beberapa bidang ditutup untuk investasi baru.
5. Bank negara diinstruksikan untuk membatasi pinjaman investasinya hanya untuk penduduk pribumi.

Tanpa investasi, pembangunan ekonomi Indonesia tidak mungkin terjadi. Gagasan sederhana ini merupakan salah satu kebenaran esensial dalam pembangunan ekonomi, karena negara sedang berkemabang senantiasa mengalami kekurangan modal, investasi asing menjadi bagian penting dalam memajukan pembangunan Indonesia. Salah satu kebijakan yang diluncurkan pemerintah dalam meningkatkan investasi asing untuk pembangunan antara lain :

1. Peningkatan kepemilikan untuk investor asing. Paket ini mengizinkan investasi asing memiliki saham 95% dari perusahaan yang berorientasi ekspor.
2. Akses di bidang keuangan untuk perusahaan patungan asing. Perusahaan patungan harus diberlakukan sama seperti perusahaan domestik dan diizinkan untuk meminjam dari bank negara dan berpartisipasi dalam rencana kredit

3. Masa berlakunya izin. Izin investasi diberikan untuk jangka waktu 30 tahun sejak berdirinya perusahaan atau sejak diperluas.
4. Pembebasan dari PPN. Semua investasi langsung (*direct investment*) dibebaskan dari pembayaran PPN untuk barang modal yang diimpor.

Indonesia tetap harus mencurahkan usaha dan sumber dayanya untuk membangun ekonomi industri. Dalam pelaksanaannya, negara bisa belajar banyak dari pengalaman program pertanian yang berhasil dan bisa diterapkan ke sektor industri untuk mendorong pembangun ekonomi, dari latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian ini, dengan judul. **"ANALISIS KETERKAITAN ANTAR SEKTOR EKONOMI INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA TAHUN 2000"**.

### **B. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang ada, agar nantinya pembahasan lebih muda di mengerti. Dalam tabel input-output (IO) terdapat 66 sektor industri yang saling kait-mengait. Namun, karena ada beberapa faktor keterbatasan hanya 24 sektor industri yang akan dianalisis.

### **C. Rumusan Masalah**

Pengaruh antar sektor dalam suatu perekonomian dapat dilihat pengaruh kedepan dan kebelakang dalam studi ini akan di analisis :

- 1) Seberapa besar pengaruh keterkaitan ke depan antar 24 sektor industri.
- 2) Seberapa besar pengaruh keterkaitan ke belakang antar 24 sektor industri.
- 3) Seberapa besar pengaruh penderatan masyarakat antar 24 sektor industri



#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan ke belakang 24 sektor industri.
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan ke depan 24 sektor industri.
- 3) Untuk mengetahui sejauh mana pendapatan masyarakat 24 sektor industri.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama ini.
- 2) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam membuat kebijaksanaan yang akan datang.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan informasi lebih lanjut.